

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2019). Pengantar Ilmu Politik. *Intrans Publishing*, Hlm 7.
- Aspek Hukum Pidana Di Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Kajian Dari Perspektif Hukum Pidana*. (2023, Mei Rabu). Retrieved From <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/350>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II*. Jakarta: Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.
- ASSHIDDIQIE, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. . Jakarta.
- Budiarjono, M. (N.D.). *Op.Cit*, Hlm 118.
- Danius, E. (2023, MEI Jumaat). *Poilitik Uang Dan Uang Rakyat*. Retrieved From Universitas Halmahera: www.unera.ac.id/pub/1/1/.
- Danius, E. (2023, MEI Sabtu). *Politik Uang Dan Uang Rakyat*. Retrieved From Universitas Halmera: www.uniera.ac.id/pub/1/1/.
- Dkk, A. P. (2019). Tata Kelola Pemilu Di Indonesia. *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, Hlm 60.
- Dr. Mohammad Syaiful Aris. (1945). Hukum Pemilu Filosofi Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI. Hlm 9.
- Ebin Danius, P. U. (2023, Mei Sabtu). *Politik Uang Dan Uang Rakyat*. Retrieved From Universitas Halmahera: [WWW.Unira.Ac.Id/Pbu/1/1/](http://www.unira.ac.id/pbu/1/1/).
- Fadlan. (2022). Money Politic Dan Aspek Aspek Dan Penegakan Hukumnya Dalam Prespektif Pidana Pemilu. *SKRIPSI*.
- Goodpaster, G. (2001). Refleksi Tentang Korupsi Di Indonesia. *USAID*, Hlm. 14.
- Harun, R. (2019). Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Kedepan . *Raja Grafindo Persada*, Hlm 47.
- Ibrahim, K. D. (1985). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. *Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Hlm 328.
- Imawan, S. (2021). Politik Uang (Cek Ke 1). *PT. Nsya Expanding*, Hlm 17.
- Juliansyah, E. (N.D.). *Op.Cit*. Hlm 4.

- Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Konstitutional. (2009). *Total Media*, Hlm 98.
- Kumorotomo, W. (2011). Intervensi Parpol, Politik Uang Dan Korupsi. *Makalah*, 15.
- Lihat Desain Sistem Pemilu : Buku Desain Panduan Baru Internasional IDEA. (N.D.).
- Lomulus, J. (2007). Sikap Pemilih Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung Di Kta Bitung Dalam Demokrasi Mati Suri. *Jurnal Penelitian*, Vp. 4 No. 1 , Hlm 35.
- Maududi, A. A. (1988). Khilafah Dan Kerajaan. *Mizan*, Hlm 19 - 31.
- MD, M. M. (1999). *Hukum Dan Pilar Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: 1999.
- MK, T. P. (2008). Konsitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Hardono, SH. *Sekjen Dan Kepaniteraan MKRI*, Hlm 59.
- Poerbopranoto, K. (1987). Sistem Pemerintahan Demokrasi. *Eresco*, Hlm 6.
- Puspitasari, S. H. (2014, MEI Jumaat). *Pengawasan Pemilu Problem Dan Tantangan*. Retrieved From BAWASLU Provinsi DIY: <https://Bawaslu.Go.Id/Id/Publikasi/Buku-Bawaslu>
- Putri, E. (2021). Money Politc Dalam Pemilu Prespektif Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *SKRIPSI*.
- Ramadhona, J. (2018). Perluasan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Dalam Pencegahan Dan Penindakan Praktik Money Politic. *SKRIPSI*.
- Santoso, S. R. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Jakarta 2008.
- Sinta Nurlaih Suryanef, A. R. (2022). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Prespektif Teory Political Development Study Di Provinsi Jambi. *SKRIPSI*.
- Sri Wahyuni Ananingdih. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah - Masalah Hukum*, 49 - 57.
- Sukmajati, E. A. (2015). Politik Uang Di Indonesia "Patronase Dan Klientalisme Pada Pemilu 2014. *Polgov*, Hlm 24.

Sulaiman, K. F. (2017). Politik Hukum Di Indonesia. *Thafa Media*, Hlm 9.

Tutik, T. T. (2017). Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Prenadama Media*, Hlm 382.

Yuslinda. (2020). Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legeslatif Tahun 2019. *SKRIPSI*.

¹ Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 118

Dudung mulyadi, “ANALISIS PENERAPAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU” vol 7 No. 1, Maret, 2019, hlm 16.

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam “Politik Uang di Indonesia” Patronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014, Penerbit PolGov, Yogyakarta, 2015, hlm.24.

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Kamal Fahmi Kurnia, Justicia Sains, jurnal ilmu hukum Vol. 03 No. 02 November 2018, hlm 172.

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail/>, Di Unduh Pada hari Senin Tanggal, 03-April-2023, pukul 20:22.

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail/>, Di Unduh Pada hari Senin Tanggal, 03-April-2023, pukul 20:22.

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail/>, Di Unduh Pada hari Senin Tanggal, 03-April-2023, pukul 20:22.

M uhaimin, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020, hlm 30.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017. hlm 26.

Soerjono Soekanto (Soekanto2), Sosiologi, Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm.6

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 37.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia, 2005, h 133

Ibid.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm 249

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 133

Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm 177.

Muhaimin, *op.cit.*, h. 57

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 135 - 136

Ibid. hlm. 59

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 142

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 181

Fahmi Gunawan dkk, *SENARAI PENELITIAN PENDIDIKAN, HUKUM, DAN EKONOMI DI SULAWESI TENGGARA*, Sleman, Penerbit Deepublish, 2018, hlm 68.

Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 195-196.

Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II", (Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 414

BAB II, Pasal 2 Ayat 2 Undang – Undang No 7 Tahun 2017

Hamdan Zoeleva, 2014, *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic.*

http://s3.amazonaws.comacademia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEG Diakses pada tanggal 15 Juni 2023

Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta : Kompas

Maria Silvy E. Wangga (*Hukum Pidana Pemilu*, 2012) hlm, 11

Silaban, Sintong, 1992. *Tindak pidana pemilu, suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil*, Jakarta: pustaka sinar harapan

Pasal 1 Ayat 17 Undang – Undang 2017

<https://sidrap.bawaslu.go.id/arumahi-lemahnya-pengawasan-terjadi-karena-masyarakat-tidak-ikut-berpartisipasi-dalam-pengawasan-pemilu/> Diakses pada jumaat 03 juli 2023

Moch Edward Triah Pahlevi DKK, “ Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Masyarakat Desa “ Jurnal Anti Korupsi, 2019, hlm 144

Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang No 7 Tahun 2017

Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II”, (Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 415 – 416

Maria sivya E. wangga, “Hukum Tindak Pidana Pemilu “ universitas Trisakti, Jakarta April, 2012, hlm 11

Pasal 2 dan 3 Undang – Undang No 7 Tahun 2017

Agus Riewanto “ Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serenta” Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 111-125 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.363> ©Komisi Pemberantasan Korupsi

¹ Valeria Busco, DKK, “*Vote Buying Argentina*” dalam latin, America Research Review, Vol. 39, No.2 Juni, 2004.

Pasal 1 Ayat 27 peraturan badan pengawasan pemilu

¹ Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum

¹ Pasal 3 huruf A dan B peraturan badan pengawasan pemilu